

**ANALISIS PERANAN PENGELUARAN PEMERINTAH,
TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI (PMDN) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001-2010**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

Eddy Wibowo Candra

0710210094



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012**

***ANALISIS PERANAN PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA dan PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI (PMDN) terhadap PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR 2001-2010***

Eddy Wibowo Candra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2001-2010. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode OLS(Ordinary Least Square). Hasil dari penelitian menunjukkan variabel independent yaitu pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak mempunyai hubungan dengan variabel dependent yaitu pertumbuhan ekonomi. Kecuali pertumbuhan ekonomi yang mempunyai hubungan dengan tenaga kerja. Selain itu variabel independent berpengaruh positif dan signifikan kecuali variabel penanaman modal dalam negeri yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

*Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pertumbuhan
Ekonomi*

A . Latar Belakang

Setiap Negara pasti mempunyai tujuan dalam pembangunan ekonomi termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas (Irawan dan Suparmoko, 2002). Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Baik ditingkat nasional maupun di tingkat yang lebih rendah seperti Provinsi atau Kabupaten/Kota Berbeda dengan negara maju, sebagian besar negara berkembang adalah negara agraris, baik itu ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial dan budayanya. Pertanian, baik itu subsisten maupun komersial, merupakan aktivitas ekonomi yang utama, baik itu ditinjau dari jumlah atau persentase angkatan kerja yang diserapnya, maupun ditinjau dari sumbangannya kepada GNP. (Todaro, 2000). Pembangunan di bidang ekonomi ini sangat penting karena dengan meningkatnya pembangunan di bidang ekonomi maka sektor-sektor yang lain akan meningkat pula seiring dengan peningkatan pada sektor ekonomi. Dalam proses pembangunan, pemerintah daerah mempunyai peranan penting karena pemerintah daerah yang lebih tahu akan potensi dan sumber daya baik manusia dan alam yang dimiliki oleh daerahnya sendiri.

Dalam proses pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi berarti terjadi kenaikan di dalam aktivitas ekonomi di daerah tersebut, jika terjadi penurunan maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut sedang mengalami penurunan. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam pembangunan ekonomi dapat diatasi dengan meningkatkan jumlah investasi. Salah satu bukti keberhasilan peranan investasi dalam pembangunan ekonomi terjadi di Botswana.

Botswana sejauh ini telah mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi di Afrika Sub Sahara:8.4% per tahun selama periode 1965-1990 dan masih tinggi, 5.1% pada tahun 1990-2002.

Tabel 1: Perkembangan Investasi PMDN di Provinsi Jawa Timur periode 2004-2009

Tahun	PMDN (dalam juta Rupiah)	Peningkatan (%)
2004	4.055.266	
2005	5.471.850	34.93
2006	167.449.029	2960.19
2007	16.705.091	-90.02
2008	19.933.800	19.32
2009	25.405.226	27.44

Sumber : Jatim dalam angka berbagai tahun (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah investasi PMDN di Provinsi Jawa Timur selama periode waktu 2004-2009 cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2007 yang mengalami penurunan sebesar 90.023 % dari sebesar 167.449.029 pada tahun 2006 menjadi 16.705.091 pada tahun 2007. Sedangkan peningkatan investasi PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2006 yang mengalami kenaikan sebesar 2960.19% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5.471.850 mengalami kenaikan menjadi 167.449.029

Dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara, tenaga kerja memberikan andil yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Kenaikan jumlah penduduk dari waktu ke waktu mampu menjadi pendorong dan penghambat pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan besarnya jumlah tenaga kerja. Hal ini akan membuat kenaikan dalam jumlah barang yang diproduksi. Tetapi pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi jika pertambahan jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja

Dari tabel 2 selama 2000-2009 terlihat sektor pertanian masih mendominasi dalam jumlah tenaga kerja meskipun berdasarkan tabel kontribusi sektoral terhadap PDB Jawa Timur selama 1975-2009 terlihat bahwa kontribusi dari sektor pertanian dari tahun ke tahun terus menurun. Pada tahun 2009 sektor pertanian mampu menampung 44.8 % dari keseluruhan tenaga kerja jawa timur. Sebaliknya sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor jasa hanya mampu menampung 12.7% dari keseluruhan tenaga kerja.

Tabel 2 : Proporsi tenaga kerja per sektor di Jawa Timur, 2000-2009

sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	46,1	45,5	45,0	45,1	44,1	46,0	44,8	45,7	43,6	44,8
Pertambangan	0,7	0,6	0,8	0,6	0,9	0,9	0,6	0,6	0,8	0,6
Industri	14,5	13,5	14,3	13,8	13,0	13,1	13,8	13,8	12,8	12,7
Utilitas	0,01	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Konstruksi	3,9	4,3	4,7	4,3	5,4	4,6	4,2	4,2	5,1	4,1
Perdagangan	20,0	18,5	19,4	19,1	20,3	19,1	19,2	19,2	20,0	20,3
Transportasi	4,7	4,6	4,2	5,2	5,0	4,8	4,4	4,4	4,9	4,4
Keuangan	0,8	1,1	0,8	1,2	0,6	1,2	1,0	1,1	1,2	1,2
Jasa	9,2	11,6	10,6	10,6	10,4	10,0	10,4	10,6	11,5	11,7

Sumber : BPS dalam Diagnosa Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

Selain itu Pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting bagi pembangunan ekonomi. Di Negara manapun pemerintah mempunyai peranan tidak hanya sekedar membuat undang-undang, peranan pemerintah ini tidak dapat dicegah. Jika di suatu perekonomian peran sektor swasta menurun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi maka pemerintah dapat memacu pembangunan ekonomi dengan cara meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah. Kenaikan pengeluaran pemerintah ini dapat merangsang perkembangan dari sektor-sektor yang lain.

**Tabel 3 : Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode
2004-2009 (000 000 Rp)**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (dalam jutaan Rupiah)	Peningkatan (%)
2004	3.516.027,16	-
2005	4.045.400,89	15,05
2006	5.126.544,6	26,72
2007	5.267.845,35	2,75
2008	6.639.780,93	26,04
2009	7.602.038,81	14,49

Sumber: Jatim dalam angka berbagai tahun (diolah)

Dilihat pada tabel 3 pada tahun 2004 pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3.516.027,16. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi Rp 4.045.400,89 atau naik sebesar 15,06 %. Pada tahun 2006 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.5.126.544,6 atau mengalami kenaikan sebesar 26,72%. Hingga tahun 2009 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 7.602.038,81 atau mengalami kenaikan sebesar 14,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di atas perlu dikaji sejauh mana peranan Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN), tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur periode 2001-2010.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil (Wijaya, 2000). Dalam hal ini kita melihat proses perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Tekanannya terletak dalam perubahannya. Pertumbuhan perekonomian berhubungan dengan kenaikan dari output per kapita sehingga ada dua sisi yang harus diperhatikan yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk. Output per kapita merupakan total output dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi dalam suatu proses dalam kenaikan output per kapita harus melihat apa yang terjadi pada total output pada satu sisi dan jumlah penduduk pada sisi lain. Sehingga jika kedua aspek itu dapat dijelaskan maka perkembangan output per kapita yang terjadi dapat dijelaskan. Dalam perspektif jangka panjang. Kenaikan output per kapita dalam waktu hanya satu atau dua tahun saja kemudian terjadi penurunan output per kapita bukanlah pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang Sukirno mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter yang dapat diturunkan dari perhitungan PDRB. Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi biasanya menggunakan Metode harga konstan. Perhitungan menggunakan metode harga konstan dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yakni: Revaluasi, ekstrapolasi dan deflasi. Untuk PDRB menggunakan pendekatan metode deflasi sangat direkomendasikan karena alasan tidak adanya data mengenai konsumsi akhir di masing-masing komoditi komponen PDRB

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori David Ricardo

Ricardo menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor sumber daya tanah, sumber daya manusia, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Pada akhirnya pertumbuhan akan berhenti pula (seperti kesimpulan Adam Smith) dan mencapai titik stationer meskipun diperlambat oleh akumulasi kapital dan kemajuan teknologi (Hakim, 2004). Dalam hal ini David Ricardo menitikberatkan pada distribusi pendapatan yang terjadi di antara pelaku ekonomi dalam menjelaskan mekanisme pertumbuhan.

Menurut Jhingan (2008), teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa :

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
2. "law of diminishing return" berlaku bagi tanah;
3. Persediaan tanah adalah tetap;
4. Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu (*given*);
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap;
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;
10. Terdapat persaingan yang sempurna;
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian yaitu, tuan tanah, kapitalis dan buruh (Jhingan, 2008). Hasil bumi yang diperoleh diserahkan kepada 3 kelompok tersebut sebagai laba, upah dan sewa. Sewa per unit tenaga kerja (buruh) merupakan perbedaan produk rata-rata dengan produk marginal dikali jumlah pekerja dan modal yang dipakai dalam pengolahan lahan. Tingkat upah pekerja ditentukan oleh cadangan upah yang dimiliki dibagi dengan jumlah pekerja.

Apabila proses produksi pertanian dianggap sebagai fungsi produksi, tanah sebagai input tetap, dan tenaga kerja manusia sebagai input variabel (untuk sementara modal dan investasi diasumsikan konstan), ketika jumlah penduduk terus meningkat maka berlakulah hukum *The law Diminishing Return*. Selama buruh yang dipekerjakan memperoleh upah diatas tingkat upah alamiah maka jumlah penduduk (angkatan kerja) akan terus naik dan hal ini akan berdampak pada penurunan produk marginal tenaga kerja dan selanjutnya akan menurunkan tingkat upah. Proses ini akan terus berlangsung sampai tingkat upah berada di bawah tingkat upah alamiah. Berlakunya Hukum *the law of diminishing return* tersebut dapat diperlambat dengan adanya peranan dari akumulasi modal dan teknologi yang cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

TEORI SOLOW -SWAN

Seperti halnya dengan model Harrod-Domar, Model Solow-Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1999).

Menurut Jhingan (2008), Solow membangun modelnya di sekitar asumsi berikut:

1. Ada satu komoditi gabungan yang diproduksi
2. Yang dimaksud output ialah output netto, yaitu sesudah dikurangi biaya penyusutan modal.
3. *Returns to scale* bersifat konstan. Dengan kata lain, fungsi produksi adalah homogen pada derajat pertama.
4. Dua faktor produksi buruh dan modal, dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal mereka.
5. Harga dan upah fleksibel

6. Buruh terpekerjakan secara penuh
7. Stock modal yang ada juga terpekerjakan secara penuh
8. Buruh dan modal dapat disubstitusikan satu sama lain
9. Kemajuan teknik bersifat netral

Berdasarkan teori Solow dan Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada kenaikan persediaan faktor-faktor seperti tenaga kerja, akumulasi modal dan teknologi. Pada teori ini rasio modal output bisa berubah jika tenaga kerja yang digunakan lebih besar maka jumlah modal yang dibutuhkan lebih sedikit tetapi jika jumlah modal yang digunakan lebih besar maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit

TEORI HARROD-DOMAR

Teori Harrod-Domar ini melengkapi Teori Keynes, jika dalam Teori Keynes melihat dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan teori Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Dalam Teori Harrod-Domar, perhatian Harrod dipusatkan pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelihara keseimbangan antara tabungan, investasi dan pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi (Hakim, 2004).

Menurut Tarigan (2005), Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

1. Perekonomian bersifat tertutup,
2. Hasrat menabung ($MPS=S$) adalah konstan
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*), serta
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan asumsi di atas Harrod Domar melakukan analisis dan membuat kesimpulan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap dapat dicapai jika terpenuhinya syarat-syarat keseimbangan

$$G = k = n,$$

Dimana: g = Growth (tingkat pertumbuhan output)

K =Capital (tingkat pertumbuhan modal)

N = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (capital output = rasio modal output)(Tarigan, 2005)

Harrod-Domar berpendapat bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap permintaan maupun penawaran. Dalam jangka panjang, investasi akan menyebabkan kenaikan stock modal seperti jalan, pabrik dan lain-lain. Di dalam suatu perekonomian, investasi memiliki peranan penting karena setiap tambahan investasi akan menyebabkan kenaikan jumlah output yang diproduksi

Pengeluaran Pemerintah

Semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan operasionalnya dan dalam hal mana pemerintah menerima balasa jasa langsung darinya seperti membayar gaji PNS dan ABRI (Putong, 2003). Menurut BPS(2010), pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan social

(biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi pemerintah) .

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen untuk mengukur besarnya peran pemerintah maupun peran pihak swasta. Selain itu pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai penentu jumlah pengeluaran agregat maupun penentu Pertumbuhan GNP riil dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah atas barang maupun jasa dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi (Sukirno, 2006)

Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori Rostow dan Musgrave

Dalam teori ini menghubungkan antara pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan tahap-tahap dalam pembangunan ekonomi yakni tahap awal, tahap tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal investasi pemerintah harus lebih besar dari total investasi karena pada tahap ini banyak sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah seperti sekolah, jalan, kesehatan, sarana transportasi. Pada tahap menengah ini, investasi pemerintah tetap dibutuhkan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada tahap ini jumlah investasi swasta semakin besar karena peran swasta semakin besar akan menyebabkan kegagalan pasar. maka pemerintah harus banyak menyediakan sarana dan prasarana publik yang lebih besar. Pada tahap menengah perkembangan ekonomi juga mengakibatkan hubungan antar sektor semakin beragam. Banyaknya eksternalitas negatif menuntut pemerintah untuk turun tangan seperti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri-industri membuat pemerintah harus turun langsung. Selain itu pemerintah juga harus melindungi kesejahteraan dari buruh yang berada dalam posisi lemah. Sedangkan pada tahap lanjut menurut Rostow, pemerintah lebih pada aktivitas menyediakan pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial seperti pelayanan kesehatan masyarakat.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil (Mangkosoebroto, 2008)

Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “dialektika penerimaan pengeluaran pemerintah” (Dumairy, 1996). Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya tetapi masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mangkosoebroto, 2008). Masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai aktivitasnya sehingga masyarakat secara sukarela membayar pajak.

Menurut teori ini, perkembangan ekonomi mengakibatkan kenaikan jumlah pungutan pajak meskipun tarifnya tidak berubah. Kenaikan penerimaan pemerintah ini juga akan mengakibatkan jumlah pengeluaran pemerintah juga naik. Hal ini terjadi jika keadaan ekonomi normal tetapi jika keadaan ini terganggu misalnya ada perang maka pemerintah memperbesar penerimaan pajak dari masyarakat. Hal ini menyebabkan dana swasta yang dapat digunakan untuk berinvestasi dan konsumsi berkurang. Ini disebut sebagai efek pengalihan. Tetapi perang tidak hanya dibiayai dengan penerimaan pajak saja tetapi juga dengan pinjaman luar negeri sehingga ketika perang telah usai yang seharusnya pemerintah dapat menurunkan pajak karena adanya pinjaman luar negeri tersebut maka pemerintah tidak dapat menurunkan pajak. Hal ini disebut efek inspeksi.

Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah sebagian kegiatan ekonomi yang tadinya dilaksanakan oleh swasta. Ini adalah apa yang dinamakan efek konsentrasi atau *concentration effect*. (Mangkosoebroto, 2008). Ketiga efek tersebut mengakibatkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga ketika selesai perang, tingkat pajak tidak mengalami penurunan seperti sebelumnya

Tenaga Kerja

Angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti, dan sebagainya) serta mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan (BPS, 2008)

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomis. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil mendapatkan pekerjaan (*employed*) dan penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga kerjanya dan belum berhasil mendapatkan pekerjaan (*unemployed*), serta penduduk yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja (Haryani, 2002).

Menurut UU no 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

Menurut Irawan dan Suparmoko (2002) yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kemudian penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik yang bekerja penuh maupun yang tidak bekerja penuh

Menurut Simanjuntak (1998) tenaga kerja atau manpower terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force terdiri dari (1) golongan yang berkerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah (2) golongan yang mengurus rumah tangga dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2007, pasal 1 ayat 2 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2007, pasal 3 ayat 2

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data merupakan data sekunder yang seluruhnya berasal dari badan pusat statistik (BPS) periode 2001-2010. Data diolah menggunakan tahap-tahap sebagai berikut :

Metode Analisis

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model regresi linear berganda. Regresi linear berganda mempunyai ciri sebagai berikut: persamaan fungsinya dapat diformulasikan kedalam bentuk persamaan matematis, sebaran ratanya berdistribusi normal, bilangan datanya rasional, nilai parameternya ditentukan oleh a dan b yang dapat diukur dengan uji statistik melalui program SPSS atau Eviews dalam komputer, permasalahannya lebih dari satu variabel, variabel independennya tidak saling berhubungan, variabel dependennya cukup jelas. Model ini dipilih karena ingin mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap tidak bebas, baik secara parsial maupun secara bersama-sama didukung oleh uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah data diolah dan dianalisis secara kuantitatif untuk memberikan penjelasan/makna dari hasil analisis kuantitatif.

Adapun formula dari model regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut:

$$PE = \beta_0 + \beta_1 PP + \beta_2 AK + \beta_3 PMDN + \mu$$

Di mana :

PE = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Rupiah)

IP = Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)

AK = Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja (orang)

PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (Rupiah)

β_0 = intersep (konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

μ = kesalahan penganggu

Uji Simultan(uji-F)

Uji F dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini dapat diketahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak.

Dalam pengujian ini hipotesisnya adalah

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Pada uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai pada F hitung dengan nilai pada F tabel

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

Ho diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel independen atau bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau terikat

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Ho ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel independen atau bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau terikat

Interpretasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi (Setiawan & Dwi, 2010). Jika nilai R^2 mendekati 1 maka semakin baik. Koefisien determinasi (R^2) memperlihatkan besarnya pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent secara serentak. Rumus untuk menghitung R^2

$$\begin{aligned} R^2 &= ESS / TSS = 1 - \frac{RSS}{TSS} \\ &= 1 - \frac{(\sum \hat{e}_i^2)}{(\sum y_i^2)} \\ &= 1 - \frac{(\sum \hat{e}_i^2)}{(\sum (Y_i - \bar{Y})^2)} \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus ini R^2 tidak pernah turun terhadap variabel bebas. Hal ini berarti R^2 akan semakin besar jika model ditambah.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan anggapan bahwa variabel yang lainnya konstan. Dalam pengujian ini menggunakan hipotesis

- Ho : $b_i = 0$, berarti bahwa variabel bebas atau independent tidak mempengaruhi variabel terikat atau dependen
- Ha : $b_i > 0$, berarti bahwa variabel bebas atau independent berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen secara positif
- Ha : $b_i < 0$, berarti bahwa variabel bebas atau independent berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen secara negative

Membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai $t_{(\frac{\alpha}{2}, n - p)}$, dengan keputusan

- Jika nilai $t_{hitung} > t_{(\frac{\alpha}{2}, n - k)}$, maka Ho ditolak. Hal ini berarti variabel bebas ke-i memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat
- Jika nilai $t_{hitung} < t_{(\frac{\alpha}{2}, n - k)}$, maka Ho ditolak. Hal ini berarti variabel bebas ke-i tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Uji Kausalitas Granger

Uji ini ditujukan untuk mengukur kekuatan dari hubungan di antara variabel dan memperlihatkan hubungan sebab akibat, dimana X menyebabkan Y atau Y menyebabkan X

Persamaan Uji Kausalitas Granger yang ditulis secara matematis sebagai berikut

$$Y_t = \sum_{i=1}^p a_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^q b_j X_{t-j} + v_t \dots \dots \dots (1)$$

$$X_t = \sum_{i=1}^p c_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^q d_j Y_{t-j} + u_t \dots \dots \dots (2)$$

Dimana (v_t, u_t) merupakan vector random bebas dengan rata-rata nol dan matriks kovarians terbatas.

Pada persamaan 1 memperlihatkan bahwa variabel X_t gagal menyebabkan Y_t jika dalam regresi Y_t terhadap Y lag dan X lag, koefisien X lag sama dengan nol.

Tiga kemungkinan arah dari uji kausalitas Granger yang membuat Uji kausalitas ini dilakukan yang pertama, X menyebabkan Y jika hipotesis nol yang menyatakan $b_j=0$ dengan $j=1, \dots, k$ dapat ditolak (persamaan 1). Kedua, Y menyebabkan X jika hipotesis nol yang menyatakan $d_j=0$ dengan $j=1, \dots, k$ dapat ditolak (persamaan 2). Ketiga, hubungan timbal balik jika X menyebabkan Y dan di saat yang bersamaan Y menyebabkan X . pengujian granger causality menggunakan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji tersebut akan diketahui variabel mana saja yang ada hubungan kausalitas (tidak menolak H_0)

Uji otokorelasi

Otokorelasi adalah suatu gejala dimana nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel sekarang dan masa datang. Menurut Setiawan & Dwi (2010). Otokorelasi dalam konsep regresi linear berarti komponen error berkorelasi berdasarkan urutan waktu (pada data berkala) atau urutan ruang (pada data tampang lintang), atau korelasi pada dirinya sendiri

Untuk menguji terhadap gejala adanya otokorelasi melalui uji Breusch-Godfrey lagrange multiplier (LM test) dengan melihat nilai $n.R^2$. apabila $n.R^2 < \text{nilai } \chi^2\text{-tabel}$ pada tingkat kepercayaan 5% berarti tidak terdapat gejala otokorelasi dan untuk mengetahui apa yang terjadi otokorelasi dapat melalui uji durbin watson dengan menggunakan prosedur

- a. H_0 : tidak terdapat otokorelasi positif apabila
 - a. $d < d_1$: H_0 ditolak berarti terdapat otokorelasi positif
 - b. $d > d_u$: H_0 diterima, berarti tidak terdapat otokorelasi positif
 - c. $d_1 < d < d_u$: tidak bisa disimpulkan
- b. H_0 : tak terdapat otokorelasi negatif apabila
 - a. $d > 4 - d_1$: H_0 ditolak, berarti terdapat otokorelasi negatif
 - b. $d < 4 - d_u$: H_0 ditolak, berarti tak terdapat otokorelasi negatif
 - c. $4 - d_1 < d < 4 - d_u$: tidak bisa disimpulkan

Multikolinearitas

Multikolinearitas yaitu suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Istilah multikolinearitas (kolinearitas ganda) pertama kali

ditemukan oleh Ragnar Frisch, yang berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel penjelas (bebas) dari model regresi ganda (Setiawan & Dwi, 2010). Untuk mendeteksi terjadi atau tidak gejala multikolinearitas dapat dilihat pada nilai dari R^2 , F hitung dan t-hitung. jika nilai R^2 dan F hitung tinggi tetapi nilai t hitung banyak yang tak signifikan.

Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi regresi linear yang harus dipenuhi adalah homogenitas variansi dari error (homoskedastisitas; homoscedasticity). Homoskedastisitas berarti bahwa variansi dari error bersifat konstan (tetap) atau disebut juga identik. Kebalikannya adalah kasus heteroskedastisitas, yaitu jika kondisi variansi error-nya (atau Y) tidak identik (Setiawan & Dwi, 2010)

Menurut Imamudin (2009) Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas digunakan metode white dengan langkah sebagai berikut:

1. Meregres model yang ada dan akan mendapatkan nilai residual U_1 , misalnya:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + u_t$$

2. Regresikan U_t sebagai berikut

$$U_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_2^2 + \alpha_5 x_3^2 + \alpha_6 x_2 x_3 + V_t$$

3. Hitung nilai x^2 dengan rumus : $n \cdot R^2$
4. Jika $x^2 > x^2(\alpha, df)$ maka berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model tersebut. Nilai df disini menunjukkan banyaknya variabel bebas dalam regresi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji kesesuaian

Untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka digunakan estimasi dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) untuk data time series dengan memakai program eviws 4 hasil dari analisis regresi terhadap model estimasi yang dipakai dalam penelitian ini ditampilkan pada lampiran

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.993504 berarti variabel pengeluaran pemerintah, tenaga Kerja dan penanaman modal dalam negeri mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 99,35 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model

Jika dilihat pada nilai probabilitas F-statistik, yakni sebesar 0.000001. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan standar deviasi (tingkat kesalahan) sebesar 10%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen yakni variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur

Tabel 4: **Hasil Estimasi pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur**

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.21E+08	44764778	-2.705951	0.0353
PP	11.30472	1.098231	10.29357	0.0000
TK	18.48968	2.747308	6.730108	0.0005
PMDN	0.046759	0.030539	1.531132	0.1766
R-squared	0.993504	F-statistic		305.8682
Durbin-Watson stat	2.615998	Prob(F-statistic)		0.000001

Sumber : Data Primer 2012 (diolah)

Berdasarkan uji t-statistik, dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri terhadap Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada $\alpha = 5\%$ dan $\alpha=1\%$.

A. Pengeluaran Pemerintah

Dari hasil estimasi terlihat bahwa Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Nilai koefisien regresi dari variabel pengeluaran pemerintah sebesar 11.30472. Hal ini berarti setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar Rupiah maka akan menyebabkan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 11.30472 miliar rupiah, dengan asumsi ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berdampak pada semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan nilai probabilitas t statistik menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur

B. Tenaga Kerja

Dari hasil estimasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Tenaga Kerja yang bekerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada koefisien regresi dari tenaga kerja yakni 18.48968. Hal ini berarti kenaikan dari Tenaga kerja sebesar 1000 orang akan menyebabkan kenaikan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 18.48968 miliar Rupiah, dengan asumsi ceteris paribus. Berdasarkan nilai probabilitas t statistik menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur

C. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dari hasil estimasi terlihat bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Nilai koefisien regresi dari variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 0.046759. Hal ini berarti setiap kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 1 miliar Rupiah akan menyebabkan kenaikan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 0.046759 miliar Rupiah, dengan asumsi ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan berdampak pada semakin tingginya Pertumbuhan Ekonomi

di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan nilai probabilitas t statistik menunjukkan bahwa PMDN tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari Autokolinearitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas

Autokolinearitas

Dalam penelitian ini akan mendeteksi adanya Autokolinearitas dengan melalui Uji Lagrange Multiplier Test (LM Test) dengan melihat nilai probabilitasnya pada tingkat kepercayaan 5% dengan criteria

1. Apabila nilai probabilitas $\text{Obs} \times \text{R-squared} > 5\%$, maka hipotesis yang menyatakan bahwa pada model yang digunakan tidak terdapat autokorelasi, tidak dapat ditolak
2. Apabila nilai probabilitas $\text{Obs} \times \text{R-squared} < 5\%$, maka hipotesis yang menyatakan bahwa pada model yang digunakan tidak terdapat autokorelasi, tidak dapat ditolak

Hasil uji autokorelasi melalui uji Lagrange Multiplier (LM Test) ditampilkan pada tabel dibawah

Tabel 5: Uji Autokolinearitas

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.068860	Probability	0.424723
Obs*R-squared	3.482921	Probability	0.175264

Sumber : Data Primer 2012 (diolah)

Dari Hasil uji LM Test diatas terlihat bahwa besarnya nilai dari probabilitas $\text{Obs} \times \text{R-squared}$ sebesar $0,175264 > 5\%$ yang menunjukkan tidak adanya gejala autokorelasi

Multikolinearitas

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas yang dilakukan dengan membandingkan nilai R^2_{yx} dengan nilai dari R^2_{xx} . Dengan kriteria keputusan

1. Apabila nilai dari $R^2_{yx} < R^2_{xx}$, maka hipotesis yang menyatakan ada masalah multikolinearitas pada model yang digunakan tidak bisa ditolak
2. Apabila nilai $R^2_{yx} > R^2_{xx}$, maka hipotesis yang menyatakan ada masalah multikolinearitas pada model yang digunakan ditolak

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas terlihat bahwa nilai dari $R^2_{LPDRB, LPP, LTK, LPMDN}$ lebih tinggi dibandingkan nilai $R^2_{LPP, LTK, LPMDN}$, nilai $R^2_{LTK, LPP, LPMDN}$ dan nilai $R^2_{LPMDN, LPP, LTK}$, maka pada model empiris tidak ada masalah multikolinearitas

Tabel 6: Uji Multikolinearitas

	Variabel	Nilai R^2
PDRB	= f(LPP, LAK, LPMDN)	0.993504
PP	= f(TK,LPMDN)	0.708180
TK	= f(LPP, LPDMN)	0.692579
PMDN	= f (LPP,LTK)	0.088806

Sumber : Data Primer 2012 (diolah)

Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji white. Dengan uji White akan diketahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada model tersebut dengan cara melakukan estimasi pada persamaan model yang diperoleh. Dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-squared} > 5\%$, maka hipotesis yang menyatakan bahwa pada model yang digunakan terdapat masalah heteroskedastisitas ditolak
2. Apabila nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-squared} < 5\%$, maka hipotesis yang menyatakan pada model yang digunakan terdapat masalah heteroskedastisitas tidak dapat ditolak

Dari hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan no cross term didapatkan nilai X^2 hitung $< X^2$ tabel, dengan nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$ sebesar $0.358807 > 5\%$ menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas

Tabel 7: Uji Heterokedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.973262	Probability	0.555416
Obs*R-squared	6.606170	Probability	0.358807

Sumber: Data Primer 2012 (diolah)

Uji Granger

Tabel 8: **Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran pemerintah**

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 01/01/02 Time: 00:08

Sample: 2001 2010

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PP	9	0.74610	0.42090
PP does not Granger Cause PE		0.55654	0.48385

Sumber : Data Primer 2012 (diolah)

Berdasarkan hasil test kausalitas granger dengan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi (PE) tidak mempunyai pengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah (PP). Begitu pula hasil test kausalitas granger Pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dari data uji Granger disimpulkan bahwa hubungan Pertumbuhan ekonomi dengan Pengeluaran pemerintah adalah tidak searah dan tidak simultan

Tabel 9: **Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja**

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 01/01/02 Time: 00:10

Sample: 2001 2010

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
TK does not Granger Cause PE	9	0.05666	0.81978
PE does not Granger Cause TK		6.85294	0.03970

Sumber : Data Primer 2012 (diolah)

Berdasarkan Hasil Uji kausalitas Granger dengan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja (TK) tidak mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh terhadap Tenaga Kerja sehingga dari data Uji kausalitas Granger disimpulkan bahwa hubungan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi adalah searah dan tidak simultan

Tabel 10: **Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal Dalam Negeri**

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 01/01/02 Time: 00:11

Sample: 2001 2010

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PMDN	9	0.37348	0.56354
PMDN does not Granger Cause PE		0.19354	0.67539

Sumber : Data Primer 2012 (diolah)

Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger dengan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Begitu pula dengan Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sehingga disimpulkan bahwa hubungan Pertumbuhan ekonomi dan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah tidak searah dan tidak simultan

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji R^2 dengan nilai 0.993504 berarti variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 99,35%, berdasarkan uji F dengan nilai probabilitas sebesar 0.000001 berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependent secara signifikan. Berdasarkan uji t semua variabel bernilai positif dan signifikan kecuali variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Berdasarkan uji otokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas tidak terdapat masalah-masalah tersebut dan berdasarkan uji kausalitas Granger, pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai hubungan dengan pengeluaran pemerintah, demikian pula pengeluaran pemerintah tidak mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil uji kausalitas Granger yang lain tenaga kerja tidak mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan dengan tenaga kerja. Hasil uji kausalitas Granger yang terakhir, pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai hubungan dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) begitu juga dengan penanaman modal dalam negeri tidak mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan kesimpulan dari penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus terus meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah karena pengeluaran pemerintah terbukti mampu meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Tetapi sebelum meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah tersebut. Pemerintah terlebih dahulu harus

tahu didalam hal apa saja dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut digunakan agar dana tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan

2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan jumlah anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Hal ini diperlukan agar tingkat produktivitas dari tenaga kerja dapat meningkat. Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan membuat berbagai peraturan daerah mengenai upah dan hal lain yang menyangkut ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga menguntungkan karyawan atau buruh
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi seperti membuat berbagai peraturan daerah tentang penanaman modal dalam negeri yang menguntungkan semua pihak terkait, memperbaiki sarana dan prasarana publik yang rusak, menjaga keamanan dan ketertiban, memberantas pungutan liar dan mempermudah birokrasi agar para investor lebih mudah untuk membuat surat ijin untuk mendirikan usaha di Provinsi Jawa Timur

Daftar Pustaka

- Afrida, BR. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Jatim Dalam Angka*. Berbagai Edisi. BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Berbagai Edisi.
- Boediono.1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE UGM : Yogyakarta
- Case & Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro* Ed 7.(Barlian Muhamad). Jakarta : Indeks
- Dedy Rustiono. 2008. berjudul Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
- Dwi Suryanto. 2011. Analisis pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten tahun 2004-2008. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. (Sumarno Zain). Jakarta: Erlangga
- Hakim, Abdul. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia
- Haryani, Sri.2002. *Hubungan Industrial di Indonesia*. Unit Penerbit dan Percetakan
- Irawan dan Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Ed 6. Jakarta: BPFE UGM
- Jhingan, Ml. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan perencanaan*. Ed 1. (D. Guritno). Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Junawi Hartasi Saragih. 2009. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

(Studi komparatif : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat). Skripsi.

Universitas Sumatera Utara

Laili, Nely Nur. 2007. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

DIY tahun 1990-2004. *Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta AMP YKPN*

:Yogyakarta

Mangkoesoebroto, Guritno. 2008. *Ekonomi Publik*. Ed 3. Jakarta : BPFE UGM

Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi* . Ed 5. (Imam Nurmawan). Jakarta :Erlangga

Masyhuri.2007. *Ekonomi Mikro*. Malang : UIN Malang Press

Nugroho, SBM. 2008. Evaluasi Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia dan Implikasi Kebijakan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang: Riptek

Nur Laili, Nelly. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 1990-2004. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Putong, Iskandar. 2003. *Ekonomi Mikro & Makro*. Ed 2. Jakarta : Ghalia Indonesia

Purba, Adearman. 2006. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Tesis. Universitas Sumatra Utara Medan

Rudiger & Stanley Fischer.1986. *Makro Ekonomi*. edisi ketiga (Rudy P Sitompul). Jakarta :Erlangga

Setiawan dan Dwi Endah Kusriani. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Penerbit Andy

Simanjuntak, Payaman J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia (edisi 2001). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi : Teori pengantar*.Ed 3. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Todaro, Michael. 2000. *Ekonomi Pembangunan di dunia ketiga*. Jakarta: Erlangga

T. Gilarso. 2004. Pengantar Ekonomi.Yogyakarta: Kanisius

Tarigan, Robinson.2005. *Ekonomi Regional,Teori dan Aplikasi*. Ed Revisi. Jakarta :Bumi Aksara

Undang-undang nomor 13.2003. Tentang Ketenagakerjaan. Presiden Republik Indonesia

Undang-undang nomor 25.2007. Penanaman Modal Dalam Negeri. Presiden Republik Indonesia

Wijaya, Farid. 2000. *Ekonomika makro*. Ed 3. Yogyakarta: BPFE UGM

Yuliadi, Imamudin. 2009. *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta : UPFE UMY

Yunan. 2009. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tesis. Universitas Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi (2011). *Diagnosa Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur*

(dikutip 23 februari 2012) , Diakses dari URL: [http :// www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

Pendapatan Nasional (2012). Pendapatan Nasional (dikutip 1 oktober 2012), diakses
dari URL: http://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan_nasional